

Pemkot Bogor Dukung Kegiatan Festival Merah Putih 2022

BOGOR (IM)- Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mendukung rencana Festival Merah Putih (FMP) yang digelar pada 31 Juli-30 Agustus 2022, dengan belasan rangkaian kegiatan untuk mendorong pendapatan asli daerah (PAD). Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Bogor, Dedie Abdurachman menyampaikan, FMP sangat fenomenal karena memeriahkan seluruh sudut Kota Hujan.

Kegiatan itu tidak bisa dilakukan semua kota di Indonesia. "Lakukan kolaborasi kegiatan di masyarakat dengan FMP, karena banyak masyarakat yang membuat perayaan Agustus namun tidak terkait dengan FMP. Itu menurut saya bisa dijadikan satu rangkaian kegiatan agar lebih meriah," kata Dedie di Paseban Narayana, Balai Kota Bogor, Jawa Barat, kemarin.

Dedie mengatakan, FMP tahun ini harus bisa mengulang kesuksesan di tahun lalu. Menurut dia, ketersediaan umbul-umbul dan bendera merah putih jangan sampai berkurang dan festival harus lebih meriah dengan melibatkan masyarakat dan instansi vertikal di Pemkot Bogor.

Panitia FMP 2022 pun telah melakukan audiensi dengan Dedie di Paseban Narayana, Balai Kota Bogor, Senin. Ketua

Panitia FMP 2022, Irwan S Widjaja mengatakan, melalui audiensi telah disampaikan rencana kegiatan dan memohon dukungan dari Pemkot Bogor. Seperti tahun sebelumnya, sambung dia, Pemkot Bogor sangat mendukung kegiatan FMP.

Pemkot juga mengarahkan agar kegiatan itu bisa memberikan dampak pada penerimaan PAD Kota Bogor. "Kegiatan mulai dari 31 Juli 2022 sampai 30 Agustus 2022. Pada 31 Juli 2022, pembukaan dengan melakukan pencairan umbul-umbul sebanyak 17.845 sekaligus menghias Lawang Salapan," terang Irwan.

Dia menyampaikan, sedikitnya ada 18 rangkaian kegiatan di FMP yang puncaknya arak-arakan bendera merah putih sepanjang 100 meter dan lebar enam meter. Ada usulan untuk mengundang perwakilan kota lain di arak-arakan bendera.

Mengingat, kegiatan itu milik bersama sesuai dengan tema besar "Untuk Indonesia Ku". "Saya pikir Pak Wali Kota (Bima Arya Sugiarto) selaku Ketua APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) mungkin bisa mengundang wali kota yang berdekatan dengan Kota Bogor untuk ikut berpartisipasi mengarak bendera," kata Irwan. • gio

Pemkot Bogor Ajukan Bantuan Rp230 M ke Pemprov DKI Jakarta

BOGOR (IM)- Pemkot Bogor tahun ini mengajukan anggaran bantuan sekitar Rp 230 miliar kepada Pemprov DKI Jakarta untuk belasan kegiatan yang diharapkan bisa terlaksana pada 2023.

"Kami mengajukan anggaran sebesar Rp 230 miliar, untuk merealisasikan kurang lebih 15 kegiatan pada tahun 2023," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor, Rudy Mashudi, kemarin.

Menurut dia, kegiatan-kegiatan yang diusulkan untuk dicover bantuan DKI ada di beberapa seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) hingga Dinas Perhubungan (Dishub).

Untuk DLH, yakni usulan pengadaan arm roll dan dump truck untuk penanganan sampah Sungai Ciliwung. Lalu pada Dinas PUPR terkait revitalisasi beberapa kolam retensi untuk penanganan banjir di DKI Jakarta.

Sedangkan Dishub, ada usulan pengadaan 10 unit bus listrik dan pembangunan park and ride di Terminal Bubulak.

Proses pengajuan bantuan tersebut, kata dia, saat ini masuk pada fase ketiga. Sebelumnya melalui usulan dan tahapan verifikasi.

"Kita masuk fase ketiga

yakni ekspos secara online. Pemprov menanggapi apa yang disampaikan oleh kita," ujarnya.

Kota Bogor sangat berharap tiga usulan bantuan bisa disetujui Gubernur Anies Baswedan, mengingat kegiatan-kegiatan tersebut punya dampak secara langsung terhadap ibu kota.

Belum lagi, terakhir kali Kota Bogor mendapat bantuan anggaran dari DKI Jakarta sudah cukup lama, yaitu pada 2018 untuk pembangunan kolam retensi.

Pada periode 2019 hingga 2022, sambung dia, Pemprov DKI Jakarta menghapus anggaran bantuan untuk daerah penyangga ibukota. Salah satu alasannya karena Covid-19.

"Artinya sudah sangat lama, bantuan terakhir untuk pembangunan kolam retensi Cibuluh sebesar Rp 10 miliar. Belum ada bantuan lagi. Kami berharap usulan itu disetujui, pertimbangannya kan memang harus berdampak pada DKI Jakarta," tandasnya.

Rencananya, Pemprov DKI Jakarta akan melakukan rapat internal yang dilakukan pekan ini atau pekan depan untuk menentukan pengajuan tersebut.

"Tentu kita berharap bisa diterima dan dilaksanakan pada 2023," tuntasnya. • gio



IDN/ANTARA

UNJUKRASA WARGA KORBAN LUMPUR LAPINDO

Warga korban lumpur dalam peta area dampak yang terdampak dalam Forum Korban Lumpur berunjuk rasa di depan gedung DPRD Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (12/7). Mereka menuntut persoalan tanah fasilitas umum dan sosial sebesar 54 hektar dan ganti rugi sebesar Rp 1,6 Miliar selama 16 tahun dan tidak menghapus Desa Kedungbendo.

Pemkab Bogor Rancang Tata Ruang Khusus untuk Dukung KEK Lido

CIBINONG (IM)- Pemerintah Kabupaten Bogor, tengah merancang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan (WP) Cijeruk, untuk mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin mengungkapkan, selain mendukung KEK Lido, pembentukan RDTR ini juga sesuai dengan amanat dari PP Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. "RDTR merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), yang berhirarki dari tingkat nasional, provinsi hingga kabupaten/kota," kata Burhanudin, Selasa (12/7).

Dia menjelaskan, RDTR juga merupakan penjabaran lebih rinci dari Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 tahun 2016 tentang RTRW, yang kemudian menjadi acuan dalam penyusunan RDTR. RDTR WP Cijeruk terdiri dari tiga kecamatan. Yakni Kecamatan Cigombong, Caringin dan Kecamatan Cijeruk, dengan luas area sekitar 3.773 hektare. Kawasan ini juga berbatasan dengan Sukabumi.

"Penyusunan RDTR ini ada kekhususan. Karena tahun ini kita juga sedang merevisi Perda RTRW Kabupaten Bo-

gor, sehingga perlu upaya lebih untuk memastikan RDTR yang disusun sejalan dengan revisi tersebut," tutur dia.

Selain itu, Pemkab Bogor juga melihat aspek manfaat dari pengembangan KEK Lido dalam pembentukan RDTR Cijeruk. Burhan berharap, KEK Lido dapat mendorong perkembangan wilayah di sekitar kawasan. "Jadi kita mendukung. Supaya sektor perekonomian di sekitar KEK ikut maju. Termasuk potensi pariwisata. Kemudian juga ke depannya ada pengembangan jaringan transportasi, seperti jalan tol hingga double track kereta Bogor-Sukabumi," jelasnya.

Di sisi lain, Burhan menilai Kabupaten Bogor memiliki posisi strategis, dari segi lokal, regional maupun nasional. Dari aspek regional, Kabupaten Bogor berada di wilayah Jabodetabekpunjur, kemudian secara nasional menjadi penyangga ibu kota. "Kita juga berbatasan dengan 11 kabupaten dan kota, sehingga penatannya harus memperhatikan tata ruang baik fungsi lokal, regional dan nasional. Juga pengaturannya harus tepat dan seimbang serta menyelaraskan dengan rencana kebijakan Kabupaten Bogor ke depan," tegasnya. • gio

8 Nusantara



IDN/ANTARA

RENCANA PENERAPAN WAJIB VAKSIN BOOSTER BAGI PENUMPANG KERETA API

Petugas memeriksa kelengkapan administrasi calon penumpang kereta api di Stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (12/7). PT KAI DAOP (Daerah Operasi) 4 Semarang pada 17 Juli 2022 akan menerapkan aturan kepada calon penumpang kereta api jarak jauh yaitu wajib menunjukkan sertifikat vaksin penguat dosis ketiga (booster) atau menunjukkan hasil tes negatif PCR bagi yang baru mendapatkan vaksin COVID-19 dosis pertama dan menunjukkan hasil tes negatif antigen bagi yang mendapatkan vaksin COVID-19 dosis kedua guna mencegah peningkatan kasus COVID-19.

Pemkab Bogor Jalankan Program Petani Milenial Cetak Agropreneur Muda Andal

Program ini menyasar petani berusia antara 19 sampai 39 tahun yang sudah menjalankan usaha agribisnis baik di sektor hulu seperti budi daya, dan sektor hilir seperti pascapanen dan pemasaran, dengan menggunakan teknologi digitalisasi.

CIBINONG (IM)-

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Distanhorbun) menjalankan Program Petani Milenial untuk mencetak agropreneur muda sebagai sumber daya manusia pertanian yang andal.

"Sehingga dapat menjadi usaha agribisnis sebagai salah satu mata pencaharian yang menjanjikan dan bisa menyejahterakan masyarakat," kata Kepala Distanhorbun Kabupaten Bogor, Sity Nurianty di Cibinong, Selasa (12/7).

Menurutnya, program ini menyasar petani berusia an-

tar 19 sampai 39 tahun yang sudah menjalankan usaha agribisnis baik di sektor hulu seperti budi daya, dan sektor hilir seperti pascapanen dan pemasaran, dengan menggunakan teknologi digitalisasi.

Sity menyebutkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat sudah mencanangkan program untuk mencetak 5.000 petani milenial tahun 2023, dengan tajuk "Tinggal Di Desa, Rezeki Kota, Bisnis Mendunia" yang fokus pada lima program prioritas yaitu penyiapan sumber daya manusia, penyiapan lahan, penyiapan off taker, fasilitas permodalan, transfer teknologi dan inovasi.

"Pemkab Bogor diberi

tugas melaksanakan dua program yaitu program penyiapan sumber daya manusia dan program penyiapan lahan, dengan berbagai upaya," terang Sity.

Distanhorbun Kabupaten Bogor saat ini baru membina 350 orang petani milenial yang bergerak di usaha agribisnis tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, dengan rincian 176 orang bergerak di komoditas tanaman pangan seperti padi, jagung, dan talas. Kemudian 140 orang bergerak di komoditas hortikultura seperti sayuran, buah-buahan, dan tanaman hias. Berikutnya, 34 orang bergerak di komoditas perkebunan seperti kopi.

"Saat ini sudah terdaftar sekitar 1.040 calon petani mile-

nial yang sudah disampaikan ke provinsi untuk diverifikasi oleh tim dari Biro Perekonomian dan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jabar," paparnya.

Perekrutan petani milenial di Kabupaten Bogor dilakukan berdasarkan mekanisme yang sudah ditetapkan oleh Pemprov Jabar, yakni dapat melalui daring maupun luring.

Masyarakat bisa langsung mendaftarkan menjadi calon petani milenial melalui website resmi Petani Milenial Provinsi Jawa Barat yakni <https://petanimilenial.jabarprov.go.id/>. Kemudian secara luring pendaftaran bisa dilakukan di Distanhorbun Kabupaten Bogor. • gio

Kang AW Fokus Siapkan Generasi yang Cerdas dan Berkualitas

BOGOR (IM)- Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, Asep Wahyuwijaya akan lebih fokus pada pembenahan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Bogor dengan cara terus menerus melakukan advokasi dan mendorong terbangunnya infrastruktur pendidikan yang layak bagi anak-anak usia didik.

"Saya sudah mendorong terbangunnya RSUD Bogor Utara, Pasar Cisarua, rehabilitasi jalan rusak akibat bencana alam banjir bandang dan tanah longsor di dua kecamatan yaitu Cigudeg-Sukajaya. Saat ini, saya fokus mendorong terbangunnya infrastruktur pendidikan demi kecerdasan dan meningkatkan kualitas pendidikan anak usia didik," ucap Asep Wahyuwijaya kepada wartawan saat melaksanakan reses ke III, Selasa (12/7).

Asep Wahyuwijaya menerangkan bahwa kerja politik, bagi dirinya selain secara mendasar memang harus berorientasi kepada permasalahan untuk publik dengan kemanfaatan yang jauh menjangkau ke masa depan namun secara proporsional kerja politik itu pun harus dapat dirasakan dalam pembuktiannya.

"Jadi, kerja politik itu bukan gimmick tapi harus substansif, bukan pencitraan tapi harus ada pembuktian yang dirasakan panjang karena basisnya pengabdian," terang Asep Wahyuwijaya.

Pria yang merupakan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu menuturkan bahwa reses harus menjadi salah satu ajang strategis bagi para politisi dan kelompok masyarakat untuk berdiskusi, menyerap, menindaklanjuti dan memperjuangkan harapan dan permohonan warga sesuai dengan kewenangan dan porsi yang diembannya.

"Saat reses seperti ini, saya lebih banyak mendengarkan suara harapan warga, terutama yang dalam kewenangan Pemprov Jawa Barat," tuturnya.

Pria yang akrab dipanggil Kang AW ini kembali meremehkan sekolah-sekolah madrasah, kobong atau pesantren di Kecamatan Cibungbulang, Tenjolaya, Cigudeg dan Parungpanjang.

Masalah yang akan dihadapi anak-anak kita di masa depan jauh lebih kompleks dibanding tantangan yang kita hadapi saat ini, jadi membekali

anak-anak dengan bekal agama yang kuat sejak dini dengan cara terus membangun madrasah adalah wujud kepedulian kita kepada anak-anak agar tak terlalu khawatir dengan tantangan yang akan dihadapi pada masa depannya, ujar politisi kelahiran Bogor ini.

La pun amat berterimakasih kepada para pengelola pendidikan dan semua pihak yang telah berkolaborasi mewujudkan setiap demi setiap cita-cita besar ini. Saat saya mendapatkan laporan bahwa ada beberapa lembaga sekolah penerima bantuan yang terkena uji petik pemeriksaan oleh BPK lalu mereka pun malah turut takjub dengan hasil pembangunannya karena jauh melebihi dari bantuan hibah yang diberikan tentunya hal ini akan menjadi preseden yang amat positif bagi penerima hibah ke depannya karena amanah bantuan yang diberikan mampu diselesaikan jauh melebihi harapan.

"Saya terus mendorong peningkatan hibah dari Pemprov Jawa Barat untuk diberikan bantuan pembangunan madrasah, kobong dan pesantren," tukas Kang AW. • gio

DPRD Kota Bogor Tagih Laporan Dana CSR Tahun 2021

BOGOR (IM)-DPRD Kota Bogor baru saja selesai melakukan pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PP-APBD) Kota Bogor tahun anggaran 2021 di tingkat komisi-komisi dan Badan Anggaran.

Dalam pembahasan PP-APBD 2021, Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, Jenal Mutaqin menyoroti tidak adanya kejelasan terhadap laporan dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSL) Kota Bogor di tahun 2021.

Jenal menerangkan bahwa TJSL harus dicatat karena masuk kedalam pendapatan daerah yang tercatat di APBD dari sumber lain-lain pendapatan yang sah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

"Lain-lain pendapatan daerah yang sah juga sudah diatur dalam Pasal 295 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang menerangkan bahwa Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf c merupakan

seluruh pendapatan Daerah selain pendapatan asli Daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ungkap pria yang akrab disapa JM ini pada Selasa (12/7).

JM menerangkan, sedangkan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Daerah yang lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

"Berdasarkan bunyi pasal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa alokasi dana TJSL untuk pembangunan daerah dapat dikategorikan sebagai pendapatan daerah berupa hibah," terang JM.

JM meminta agar Pemkot

Bogor segera menyampaikan laporan dan TJSL 2021. Hal tersebut jelas sudah tertuang didalam ayat (3) pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang berbunyi Pemerintah Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan TJSL setiap tahun kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

"Nantinya dari laporan ini kami bisa tahu bahwa untuk melakukan pemerataan pembangunan dan mengurangi kesenjangan sosial kami bisa memaksimalkan dana TJSL ini," jelas JM.

JM membeberkan, isu terkait kesehatan masih menjadi persoalan serius yang harus bisa diselesaikan oleh Pemerintah Kota Bogor, sehingga menurut JM dana CSR ini bisa digunakan untuk membantu warga miskin yang mengalami tanggakan BPJS Kesehatan.

"Dana CSR ini bisa ditingkatkan lagi penggunaannya dengan perencanaan yang maksimal dari pihak tim fasilitator TJSL, contohnya untuk membantu warga yang menunggal BPJS Kesehatan," bebarnya.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Said Muhamad Mohan, mengungkapkan, berdasarkan informasi yang sementara ia terima, didalam data LKPJ 2021, dana CSR Kota Bogor hanya sebesar Rp2 miliar dengan jumlah 17 perusahaan yang menyalurkan.

"Jumlahnya mengalami penurunan dari tahun 2020, yang tadinya Rp4 miliar dengan 18 perusahaan. Tentu ini menjadi perhatian kami," terang Mohan.

Untuk itu, Mohan mengungkapkan, Komisi IV DPRD Kota Bogor telah meminta ke Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) dan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM (Disperindagkop-UMKM) Kota Bogor data perusahaan yang memiliki kewajiban menyalurkan dana CSR. "Nantinya dari data-data tersebut akan kami pantau langsung penyaluran dana CSR tersebut," pungkasnya. • gio



IDN/ANTARA

PRODUKSI GULA MERAH DI KUDUS

Pekerja memproduksi gula merah di Desa Cendono, Dawe, Kudus, Jawa Tengah, Selasa (12/7). Gula Merah yang terbuat dari sari tebu yang diolah secara tradisional untuk dijadikan bahan pembuatan kecap yang dipasarkan ke sejumlah daerah di Pulau Jawa itu dijual Rp8.500 - Rp10.000 per kilogram tergantung kualitas.